

TESIS

**PENENTUAN BESARAN MODAL PERSEROAN
TERBATAS PERORANGAN BERDASAR UU CIPTA
KERJA GUNA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN
BERUSAHA**



OLEH :

NANDITA DWI SAVITRI

NIM. 031924253001

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PENENTUAN BESARAN MODAL PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN
BERDASAR UU CIPTA KERJA GUNA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN
BERUSAHA**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH :

**NANDITA DWI SAVITRI
NIM. 031924253001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

Pada tanggal 20 Juni 2022

Oleh :

Dosen Pembimbing Ketua:



Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.
NIP. 196001061990021001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 19810915 2006041002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 1 Juli 2022

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M..H

Anggota : 1. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H

2. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.

3. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.

4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M

MOTTO:

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu,
maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

H.R. TIRMIDZI

ABSTRACT

Perseroan Terbatas Perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memberi kemudahan bagi pengusaha UMKM dapat mendirikan suatu perseroan terbatas dengan status badan hukum guna meningkatkan perekonomian bangsa. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Ratio Legis mengebai besaran modal Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan akibat hukum terhadap modal Perseroan Terbatas Perorangan terkait kriteria UMK. Bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan akibat hukum mengenai modal perseroan terbatas perorangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu tidak ada aturan Besaran modal Perseroan terbatas Perorangan didasari oleh ketentuan modal yang telah diatur dalam UU PT yang dianggap menghambat pengusaha UMKM. Pemerintah berharap dengan dihapusnya batas minimal modal tersebut dapat mempermudah dan meningkatkan pengusaha UMK dalam melakukan aktivitas usaha dan mempermudah dalam pendirian perseroan terbatas perorangan dengan status badan hukum guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional maupun global yang merupakan upaya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan* akibat hukum yang dari tidak terpenuhinya kriteria UMK yang diatur dalam pasal 9 huruf b PP No.8 Tahun 2021 diharuskan melakukan pembaharuan atau perubahan status sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Perubahan status ini dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik sesuai dengan ketentaun Perkemenkumham No.21 Tahun 2021 pasal 17 ayat 3.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas Perorangan, Besaran Modal, Usaha Mikro dan Kecil

ABSTRACT

Individual Limited Liability Companies regulated in the Job Creation Law aim to make it easier for MSME entrepreneurs to establish a limited liability company with legal entity status to improve the nation's economy. The formulation of the problem studied in this study is the Legis Ratio to ignore the amount of limited liability company capital in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the legal consequences of the capital of individual limited liability companies related to the criteria for MSEs. It aims to analyze the legislative ratio and legal consequences regarding the capital of an individual limited liability company. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. This study obtained the conclusion that there is no regulation on the amount of capital of individual limited liability companies based on capital provisions that have been regulated in the PT Law which are considered to hinder MSME entrepreneurs. The government hopes that the removal of the minimum capital limit can facilitate and increase MSE entrepreneurs in carrying out business activities and make it easier to establish individual limited liability companies with legal entity status in order to increase national and global economic growth which is an effort to create a conducive business climate and legal consequences that do not meet the UMk criteria regulated in article 9 letter b of PP No.8 of 2021 are required to make updates or changes in status in accordance with predetermined criteria. This change in status is carried out through a notarial deed and registered electronically in accordance with the establishment of Kampenkumham No.21 of 2021 article 17 paragraph 3.

Keywords: *Individual Limited Liability Company, Capital Size, Micro and Small Enterprises*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nandita Dwi Savitri

NIM : 031924253001

Alamat/No. Tlp. : Jalan Nusa Indah III/No. 7 BTN Swete Indah, RT 006, RW
281, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat./087864018222

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Nandita Dwi Savitri

NIM 031924253001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Penentuan Besaran Modal Perseroan Terbatas Perorangan Berdasar UU Cipta Kerja Guna Mewujudkan Kemudahan Berusaha”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kebijakan serta nasihatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingannya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku dosen wali yang membantu dan membimbing Penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Ketua yang banyak memberikan masukan, bimbingan, serta arahan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

5. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku dosen pembimbing kedua yang banyak memberikan masukan, bimbingan, serta arahan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Mohammad Sumedi S.H., M.H., Ibu Dr. Nurwahyuni, S.H., M.H., dan Ibu selaku penguji tesis terimakasih telah memberikan masukan, dan bimbingannya kepada Penulis demi kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga yang selama ini telah mencurahkan ilmu dan mendidik Penulis selama Penulis menempuh pendidikan.
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga yang telah memberikan arahan dan bantuannya baik selama Penulis menempuh pendidikan maupun selama penyelesaian penyusunan tesis ini.
9. Yang tercinta kedua orang tua saya dan kakak saya yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk keluarga saya semoga selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah SWT.

10. Terimakasih banyak untuk semua pihak yang terlibat dalam mendukung Kesehatan mental Penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu .

Semoga amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat mencapai kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama dibidang Hukum Perdata.

Surabaya, 10 Juni 2022

Penulis,



Nandita Dwi Savitri

NIM 031924253001

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*);

Burgerlijk Wetboek, (*Staatsblad* 1847 Nomor 32);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Directive 2009/102.EC of European Parliament and of the council of 16 September 2009 in the area of company law on single-member private limited liability companies. Lihat juga United Kingdom Undang-Undang Perseroan Terbatas 2006 (Chapter 46).

Malaysia Undang-Undang Perseroan Terbatas 2016 (Act 777).

Singapore Undang-Undang Perseroan Terbatas 1967 (Chapter 50), last amended in 2006.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii _
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	11
1.5.6 Sistematika Penulisan	12

BAB II. RATIO LEGIS MENGENAI BESARAN MODAL PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

2.1 Perseroan Terbatas.....	15
2.2 Ratio Legis Besaran Modal Perseroan Terbatas Perorangan.....	28
2.3 Pengaturan Perusahaan Perorangan pada UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.....	40

BAB III. AKIBAT HUKUM TERHADAP MODAL PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN TERKAIT KRITERIA UMK (USAHA MIKRO DAN KECIL)

3.1 Perusahaan Perorangan dalam Kemudahan Berusaha.....	451
3.2 Perusahaan Perorangan di Negara lain	48
3.3 Akibat Hukum terhadap Modal Perseroan Terbatas Perorangan terkait Kriteria UMK	58

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran	66

DAFTAR BACAAN.....	xvii
---------------------------	-------------